

PENATARAN LINDUNGAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (LK3)

H. Thamrin Dahlan Shidieq, SKM. *)

Latar belakang

Laju pembangunan di Indonesia pada pembangunan jangka panjang tahap II (PJP II) akan berkembang dengan pesat sekali khususnya di sektor ekonomi yang didukung oleh perkembangan dan pertumbuhan industri. Perkembangan industri seperti ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif dalam aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (LK3). Untuk mencegah dan meredam keadaan yang merugikan itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan Undang-undang mengenai aspek LK3 tersebut, demikian juga telah adanya aparat-aparat yang bertugas menegakkan peraturan-peraturan dan Undang-undang tersebut. Agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya pembudayaan LK3 di lingkungan industri yang pelaksanaannya perlu didukung oleh aparat hukum antara lain Polri.

Tema :

PERANAN POLRI DALAM MEMBUDAYAKAN LINDUNGAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNTUK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.

Maksud dan tujuan

PT. PATRA DINAMIKA/PT. INSIADIPO sebagai sponsor bersama-sama dengan PERTAMINA ingin memberikan sumbangan

*) Mayor Pol, Kanit KB Lakesum

berupa kecakapan teknik yang dimilikinya dalam aspek LK3 bagi para penegak hukum dalam hal ini Polri.

Tujuannya adalah untuk menambah wawasan tentang peraturan-peraturan dan Undang-undang mengenai LK3, struktur dan teknis pelaksanaan serta pengawasan secara umum di lapangan sehingga nantinya Polri dapat ikut serta dalam mengawasi, menegakkan dan membudayakan LK3 di masyarakat industri.

Tempat dan waktu penataran

1.) Tempat.

Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Pertamina Pusat Jln. Sinabung II Terusan simprug Jakarta Selatan.

2.) Waktu.

Waktu penataran tanggal, 23 Januari 1995 sampai dengan 27 Januari 1995 mulai pukul 08.00-14.00 WIB.

Peserta :

Peserta Perwira Menengah (Pamen) Polri sebanyak 25 orang yang berasal dari :

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Polda Sumut | : 1 orang |
| 2) Polda Sumbagsel | : 2 orang |
| 3) Polda Metro Jaya | : 2 orang |
| 4) Polda Jabar | : 2 orang |
| 5) Polda Jateng | : 1 orang |
| 6) Polda Jatim | : 2 orang |

- 7) Polda Nusra : 1 orang
- 8) Polda Kaltim : 1 orang
- 9) Polda Sulselra : 1 orang
- 10) Ditserse Polri : 2 orang
- 11) Ditbimmas Polri : 1 orang
- 12) Ditdik Polri : 1 orang
- 13) P T I K : 1 orang
- 14) Disdokes Polri : 1 orang
- 15) Dislitbang Polri : 1 orang
- 16) Diskum Polri : 1 orang
- 17) Puslabfor Polri : 4 orang
(Mabes, Sumut, Jateng dan Jatim)

Materi penataran :

1. *ASPEK MAKRO DAN NASIONAL.*

- a). AMDAL dan peranannya dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan.
- b). Pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan.
- c). Aspek hukum dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan
- d). Persiapan keahlian penyidik dalam pengetahuan lingkungan lingkungan (*Environment*).
- e). Aspek hukum dalam pengelolaan K3.
- f). Potensi sumber dampak lingkungan pada industri minyak, gas dan panas bumi serta usaha pengelolaannya.
- g). Pemantauan dan audit lingkungan sebagai alat manajemen.

2. *IMPLEMENTASI TEKNIS LK3 PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN.*

- a). Pembangunan berkelanjutan : Konsep dan pengelolaannya di Indonesia.

b). Pengamanan operasi kegiatan industri : Permasalahan, tantangan dan upaya pencegahannya.

c). Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan lingkungan hidup industri.

d). Aspek ekologi dan lingkungan lingkungan.

3. *KEADAAN DARURAT PADA ASPEK LK3*

a). Kewaspadaan dan kesiagaan penang-gulangan bencana.

b). *Contingency Planning* Pencemaran Laut.

c). Pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia.

d). Kesehatan kerja : Permasalahan, tantangan dan upaya pengelolaannya.

e). Pengawasan pemerintah terhadap aspek K3 dari kegiatan industri.

f). Aspek teknologi lingkungan dalam kegiatan pembangunan di Indonesia.

g). Peran Polri dalam pengamanan aspek LK3 di Indonesia.

4. *STUDI KASUS*

a). Studi kasus lingkungan hidup.

b). Studi kasus K3.

5. *PENINJAUAN LAPANGAN*

Peninjauan lapangan ke instalasi pertamina UPPDN III Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pembicara

1). BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).

2). DEPNAKER

3). Staf Ahli MENNEG Lingkungan Hidup.

4). Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.

5). PERTAMINA

6). Departemen Pertambangan dan Energi



RAKERNAS DOKKES POLRI T.A.
TGL. 23 s/d 24 JANUARI 1995 JAKARTA

Irjen Polri selaku Irup mewakili Kapolri pada Rakernis Dokkes Polri tanggal 23 s/d 24 Januari 1995 di Jakarta.



RAKERNAS DOKKES POLRI T.A.
TGL. 23 s/d 24 JANUARI 1995 JAKARTA

Para peserta Rakernis Dokkes Polri terdiri dari Kadisdokkes Polda, Karumkit, Kakes Lemdik, Kasatkes Denma dan staf Disdokkes Polri.



Kadisdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. Hendro Satmoko menekan tombol tanda Peresmian nama Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS. Sukonto.



Salah seorang perwakilan dari keluarga almarhum Bapak RS. Sukanto (mantan Kapolri I) melepaskan balon sebagai tanda peresmian nama Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS. Sukanto.



Salah seorang purnawirawan Kol Pol Dr. Wahyono menerima kenang-kenangan dari kadisdokkes.



Bergembira dan bernyanyi bersama pada acara purna tugas Pamen Disdokkes Polri.



Serah terima jabatan Kadisdokes Polda Sumut dari Letkol Pol Dr. Tindi R Lumbantoruan kepada Letkol Pol Dr. Yusuf Budiman di Medan pada tanggal 29 Maret 1995.



Foto bersama antara Kapolri, Direktur Umum Pertamina dan Direktur PT Insiadipo serta seluruh peserta penataran LK3 pada acara penutupan kursus tanggal 27 Januari 1995 di Aula Pertamina Simpruk Jakarta.

7). Departemen Perhubungan.

8). Mabes Polri.

Rangkuman materi penataran

a. PEMBANGUNAN BERKELAJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Polda Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi dengan titik berat pembangunan industri. Dengan pola pembangunan semacam itu selma 25 tahun, bangsa Indonesia telah mengeksploitasi semua kekayaan alam tanpa memperhatikan terhadap dampak lingkungan.

Dengan latar belakang pengalaman negara-negara lain yang terlalu mengeksploitasi sumber daya alamnya, dimana pada saat ini negara-negara tersebut mengalami dampak akibat pengrusakan lingkungan tersebut berupa banjir, polusi, kerusakan ekologi, di penghujung abad ke 20 ini dunia dihadapkan kepada 8 (delapan) masalah besar berkaitan dengan lingkungan, yang disebabkan oleh kegiatan dan ulah manusia dalam pembangunan yang kemudian berkembang menjadi issue global.

Ke 8 masalah lingkungan tersebut adalah :

Adanya penemaran udara yang mengakibatkan adanya :

- 1). Efek rumah kaca (*Green house effect*).
- 2). Hujan asam (*Acid rain*)
- 3). Penipisan lapisan ozon (*Ozone layer depletion*).

Adanya pengrusakan sumber daya alam hayati (*biosource*).

- 4). Penggundulan hutan (*deforestation*).
- 5). Penggurunan tanah (*desertification*).
- 6). Pengurangan/pemborosan air tawar (*water depletion*).
- 7). Pemunahan species (*species extinction*).

Adanya peracunan atas tanah dan air.

- 8). Penggunaan pestisida, herbisida dan sampah/limbah beracun.

Di samping itu timbul kesadaran bangsa di dunia berupa kepedulian terhadap lingkungan, maka Pembangunan Nasional di Indonesia pada PJP II harus berupa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*Enviromental Sound Sustainable Development*).

2. PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN

Political will pemerintah Indonesia berupa kepedulian terhadap lingkungan di-jabarkan dalam bentuk Undang-undang No. 4 tahun 1982.

Namun dalam gerak pelaksanaannya sampai saat ini, masih belum begitu me-muaskan, walaupun pihak-pihak yang ter-libat langsung dengan lingkungan itu telah mendapat tekanan (*pressure*) dari kalangan yang ber-kompeten.

Upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) saat ini telah mencapai tindakan represif setelah melalui tahap kampanye yang cukup panjang.

Upaya-upaya Menteri Lingkungan Hidup tersebut terlibat dengan telah dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah seperti :

- a. Undang-undang No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya.
- c. Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-Undang No. 6/1994 tentang Konservasi PBP Perubahan Iklim.
- e. Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- f. Peraturan Pemerintah No. 51/1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

g. Peraturan Pemerintah No. 19/1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

h. Keppres 23/1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).

i. Keputusan Menteri KLH No. Kep-02/Men KLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

j. Keputusan Menteri KLH No. Kep-03/Men KLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan yang sudah beroperasi.

k. Keputusan Menteri LH No. Kep-11/Men LH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

l. Keputusan Menteri LH No. Kep-12/Men LH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengolahan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

yang diharapkan dengan adanya rambu-rambu tersebut gerak pemerintah dalam pelestarian lingkungan akan lebih bergema dan menggigit.

3. UPAYA PENGAMANAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Berbagai upaya dilakukan untuk pengamanan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan antara lain :

a. Penyiapan perangkat lunak, yang dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan hidup, misalnya :

1. Ketentuan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 tahun 1990) sebagai pelaksanaan dari pasal 12, UU No. 4 tahun 1982.

2. Ketentuan tentang Perlindungan Cagar Budaya (UU No. 5 tahun 1993) sebagai pelaksanaan dari pasal 14, UU No. 4 tahun 1982.

3. Ketentuan tentang Baku Mutu Air (kualitas air), dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990, tanggal 5 Juni 1990.

4. Ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP No. 51 tahun 1993) sebagai pelaksanaan dari pasal 16 UU No. 4 tahun 1982.

5. Ketentuan tentang Prosedur penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 03/SE/MENKLH/6/87, tanggal 5 Juni 1987.

b. Penyiapan kelembagaan (*Institution*). Telah dibentuk lembaga/badan yang menangani masalah dampak lingkungan misalnya : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), yang ditugasi dalam bidang pembinaan, pengelolaan dan pengawasan dampak kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, di masing-masing Departemen Sektorial telah dibentuk Komisi AMDAL, demikian pula di Pemerintah Daerah Tk. I.

c. Penyiapan di bidang perangkat keras. Di bidang perangkat keras ini telah disediakan kantor, dan peralatannya, laboratorium rujukan, pusat pengolahan limbah dan lain-lain, walaupun masih terbatas jumlah.

4. PERANAN POLRI.

Penegakan Hukum Lingkungan. Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan surat edaran Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Nomor : 03/MENKLH/6/87, melibatkan beberapa instansi terkait yaitu :

- Departemen Dalam Negeri (Pemda).
- Departemen Kehakiman.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Kejaksaan Agung.

e. Polri.

Sanksi dalam Undang-undang lingkungan hidup, meliputi 3 (tiga) macam sanksi/hukuman.

- a. Bersifat administrasi diberikan oleh Departemen Dalam Negeri (Pemerintah Daerah), misalnya : Pencabutan ijin usaha, masalah pemberhentian kegiatan produksi, penanggulangan korban dengan obat yang diperlukan dan kalau perlu di bawa ke Rumah Sakit.
- b. Bersifat perdata, misalnya masalah ganti rugi, dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan.
- c. Bersifat pidana dijatuhkan oleh hakim di depan sidang pengadilan, melalui prosedur penyidikan oleh Polri dan penuntutan oleh Jaksa.

Di samping upaya penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan pula upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) yaitu antara lain :

- a. Melaksanakan pemantauan lingkungan secara koordinatif bersama instansi terkait secara terus-menerus terhadap kemungkinan terjadinya perubahan lingkungan hidup.
- b. Menyampaikan informasi dan saran kepada Pemda dalam penanganan secara terpadu permasalahan lingkungan hidup di daerah.
- c. Membersihkan respon yang cepat terhadap setiap laporan/keluhan masyarakat tentang adanya perubahan kondisi lingkungan (akibat tercemar/rusaknya lingkungan).
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar memahami, mentaati, kemudian berpartisipasi aktif, dalam pencegahan peusakan dan pencemaran lingkungan hidup di wilayahnya.
- e. Menyampaikan laporan kepada satuan atasan dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya dalam sesuatu masalah lingkungan agar tidak berkembang menjadi

konflik yang tidak diharapkan, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan.

Melihat luasnya permasalahan lingkungan tersebut, maka seyogyanya peran Polri harus dibantu pula berbagai pihak.

Peran serta semua pihak dalam upaya pelestarian lingkungan ini sangat diharapkan baik dari aparat pemerintah itu sendiri maupun dari dikalangan industri serta kepedulian masyarakat yang diharapkan sebagai *Social Control*.

Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan.

- 1). Penataran LK3 bagi perwira menengah Polri sangat bermanfaat bagi kelengkapan pengetahuan dan informasi bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Polri terutama menyangkut lingkungan, khususnya dalam upaya penyidikan pencemaran lingkungan.
- 2). Luas dan rumitnya permasalahan lingkungan di Indonesia, memerlukan suatu perhatian khusus dari instansi terkait dalam bentuk koordinasi penanganan permasalahan lingkungan, untuk itu diperlukan penataran/pelatihan tentang lingkungan bagi penyiapan sumber daya manusia yang benar-benar ahli dan profesional bagi penanganan tugas tersebut.
- 3). Disdokkes Polri mempunyai akses bagi penyidikan lingkungan, bekerja sama dengan Direktorat Reserse, Dokkes dapat membantu dalam hal teknis pencemaran lingkungan.

S a r a n.

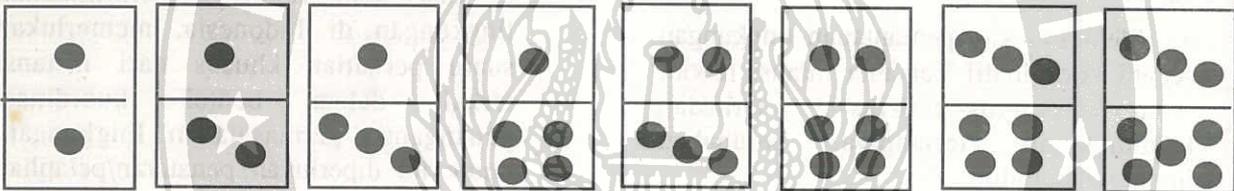
1. Perlu tidak lanjut (*follow up*) atas ahli penataran LK3 di lingkungan Disdokkes Polri antara lain dibentuknya kelompok kerja yang khusus menangani permasalahan lingkungan guna kesiapan Disdokkes Polri dalam mendukung tugas operasional Polri dalam masalah lingkungan.

2). Untuk penataran LK3 berikutnya, disarankan dikirimkan lebih dari 2 orang anggota Disdokkes dengan bidang tugas yang relevan agar wawasan petugas yang menangani permasalahan lingkungan menjadi lebih luas dan mempunyai kemampuan dalam menunjang tugas operasional Polri.

3). Semua makalah dan peraturan perundangan yang diterima selama penataran LK3 ditempatkan di perpustakaan Disdokkes Polri, agar dapat dijadikan bahan rujukan dalam penanganan permasalahan lingkungan.

BRAIN STORMING

SEBUAH BUJUR SANGKAR DOMINO AJAIB



Susunlah delapan domino yang diberikan di atas ini untuk membentuk sebuah bujur sangkar 4 x 4 sedemikian rupa sehingga jumlah mata dalam setiap baris, kolom dan diagonal sama.

BERITA KEGIATAN

RAKERNIS DOKKES POLRI TAHUN 1994/1995

Sebagai realisasi Program Kerja Disdokes Polri TA 1994/1995 telah dilaksanakan Rapat Kerja Tehnis Kedokteran Kesehatan Polri bertempat di Pusdik BKKBN Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 24 Januari 1995, rapat kerja ini dihadiri :

1. Kadisdokkes Polda	17 orang
2. Karumkit Polpus	1 orang
3. Karumkit Kepolisian TK III	5 orang
4. Kakes/Pakes Lemdik	11 orang
5. Kasatkes Denmabes Polri	1 orang
6. Kasidokkes Polwil NTT	1 orang
7. Staf Disdokes Polri	25 orang

Tema Rakernis :

"Dengan peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pelayanan Disdokes Polri beserta jajaran-nya siap mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam PJP II".

Rakernis kali ini dibuka oleh Irjen Polri Mayjen Pol. Drs. Purwanto Lenggono mewakili Kapolri.

Materi Rakernis selain pengarahan dari Kapolri, Kapuskes ABRI, Dirkes Ditjen Matfasjasa Dephankam, Kadisdokkes Polri juga di isi dengan ceramah dan paparan dari pejabat Disdokes Polri serta permasalahan daerah oleh perwakilan Polda yang ditunjuk.

Materi Ceramah :

1. Perkembangan Ilmu dan Teknologi Biomolekuler dan manfaatnya bagi Polri, oleh: Prof. Dr. Sangkot Marzuki, MD.
2. Akreditasi Rumah Sakit dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, oleh dr. Bagus Moelyadi (Depkes R.I)
3. Perkembangan terakhir AIDS di Indonesia oleh dr. Zubairi Djoerban
4. Penjelasan tentang pola pembinaan karier Perwira oleh : Dir Rendal Pers Polri.

Di samping itu juga diadakan Diskusi yang membahas "Tolok Ukur Keberhasilan Pembinaan Dokkes Satwil Polri" ditinjau dari :

1. Pembinaan Sumber Daya Dokkes
2. Pembinaan Opsnal Dokkes
3. Hasil Pembinaan Dokkes

Dari diskusi ini diharapkan adanya masukan yang berguna bagi penyempurnaan Konsep Awal Tolok Ukur Keberhasilan Pembinaan Dokkes Satwil Polri.

Kegiatan Rakernis ini didukung oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana berdasarkan Sprin Kadisdokkes Polri No. Pol.: Sprin/53/I/1995 tanggal 7 Januari 1995.

MALAM PENGANTAR PURNA TUGAS PAMEN DISDOKKES MABES POLRI

Pada tanggal 19 Februari 1995, Disdokkes Polri mengadakan acara malam pengantar Purna tugas untuk 13 anggota pamen Disdokkes Mabes Polri.

Acara ini dilakukan dalam bulan Ramadhan dengan maksud untuk bisa melakukan buka puasa bersama. Acara ini dimulai pada Jam 19.30 dan diawali dengan buka puasa bersama.

13 pamen ini adalah : Kol. Pol (purn) Dr. Wahyono, Kol. (Purn) Dr. Bambang Sumakno, Kol. Pol (Purn) Drg. Soebandi, Letkol Pol (Purn) Drg. Haryadi, Letkol Pol (Purn) Dr. Hermanuadi, Letkol Pol (Purn) Dr. Djunarto, Letkol Pol (Purn) Dr. Seto

Santoso, Letkol Pol (Purn) Dr. Sri Mantoro, Letkol Pol (Purn) Dr Masliana Harun, Letkol Pol (Purn) Ucu Chaeratina.

Malam pengantar Purna Tugas ini dihadiri oleh Kadisdokkes Brigjen Pol Dr. Hendro Satmoko dan Ses Disdokkes Kolonel Pol Dr. H. Didin R. Roesamsi dan ibu dan juga para purna bakti generasi sebelumnya.

Kecuali sambutan acara ini juga diisi dengan penyerahan bingkisan oleh Kadisdokkes dan diakhiri dengan acara hiburan Band dari Rumkit Polpus di bawah pimpinan Mayor Pol Dr. Anwar dan diramalkan dengan acara nyanyi bersama dan perorangan dari para purna bakti.



Bapak Kadisdokkes memberi sambutan pada acara purna tugas Pamen Disdokkes Polri.

PENATARAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN BAGI BINTARA POLRI NON PARAMEDIS DI JAJARAN DISDOKKES POLRI TAHUN 1995

Disdokkes Polri telah mengadakan penataran P3K bagi Bintara Polri Non Paramedis di jajaran Disdokkes Polri dengan sasaran Seluruh Bintara Polri Non Paramedis di jajaran Disdokkes Polri.

Tujuan Penataran P3K ini adalah peningkatan pengetahuan prajurit Polri dalam bidang kesehatan yang meliputi penanganan pertama pada korban kecelakaan, di mana sebagai seorang prajurit yang bekerja di bidang kesehatan harus mempunyai pengetahuan kesehatan di samping pengetahuan fungsi kepolisian sehingga sewaktu-waktu diperlukan tenaganya di bidang kesehatan siap melaksanakan tugas.

Pelaksanaan kegiatan selama 3 hari dari tanggal 21 s/d 23 Maret 1995 bertempat di Aula Lafipol Cipinang Jakarta-Timur.

Materi yang diberikan antara lain :

1. Anatomi dan fisiologi tubuh.
2. Petunjuk menghadapi penderita dalam memberikan P3K dan Pengenalan obat-obatan untuk P3K.
3. Teori dan penanganan penderita kegagalan pernafasan dan henti jantung.
4. Teori dan penanganan orang tenggelam dan penderita perdarahan.
5. Teori dan penanganan penderita syok.
6. Teori dan penanganan patah tulang terbuka dan tertutup dan penderita cerai sendi.
7. Teori dan penanganan luka bakar, kejang-kejang, ruda paksa pada kepala.
8. Teori dan penanganan penderita keracunan, digigit ular dan penderita kejang.

PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN PENDERITA GAWAT DARURAT POLDA NUSRA 1995

Disdokkes Polda Nusra bekerja sama dengan Dit Diklat Polda telah melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat. Pelatihan diadakan selama 6 hari dari tanggal 27 Maret 1995 s/d. 3 April 1995 bertempat di ruang kelas Dit Diklat Polda Nusra. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota dalam penanggulangan penderita gawat darurat dan juga kemampuan pertolongan pertama di lapangan. Peserta Pelatihan terdiri dari anggota-anggota Sabhara, PJR, Satlantas, Brimob dan Sat Pol Air sejumlah 30 orang.

Materi Pelatihan antara lain :

1. Tindakan dalam menghadapi penderita
 2. Resusitasi
 3. Menghentikan perdarahan
 4. Syok
 5. Pertolongan patah tulang
 6. Tenggelam
 7. Keracunan
 8. Gigitan ular berbisa dan lain-lain.
- Instruktur dari Pakes Disdokkes Polda dan Perwira Staf Diklat Polda Nusra.

MISI Mencari Data DARI TIM PENERBITAN BUKU SEJARAH DISDOKKES POLRI

Pada tanggal 20 Maret 1995, tim penerbitan buku sejarah Disdokkes Polri berangkat ke Jawa Tengah yang dilakukan oleh Mayor Pol Marnoto dan Mayor Pol drg. Girihardja S dari staf Disdokkes Maber Polri.

Mereka singgah di Semarang dan diterima oleh Kadisdokkes Jateng Kolonel dr. Agus Subagyo MBA. Dengan bantuan beliau tim menggunakan kendaraan dinas Kadis untuk mencapai sasaran yaitu kota Magelang.

Di Magelang diterima oleh Wakapolwil Kedu yaitu Letkol Pol. Drs. Hanifan dan juga Kasikes Magelang yaitu Kapten Pol Dr. Hernawan. Dengan bantuannya mereka menuju ke Sekolah Seminari Menengah Mertoyudan dan diterima oleh Romo Maryono.

Gedung sekolah Seminari Menengah ini merupakan salah satu cikal bakal adanya SPN pertama setelah Indonesia merdeka dan menjadi Republik.

Dalam peninjauan ke sekolah ini dengan bantuan Romo Maryono didapat keterangan-keterangan yang berguna dalam mengumpulkan data mengenai bangunan fisik dari sekolah SPN pertama. Adapun di SPN ini diperkirakan kesehatan Polri pun sudah ada, karena

menurut keterangan Romo Maryono bangunan sebagian besar masih ASLI dan juga ruangan-ruangannya diper-gunakan sebagaimana dahulunya, seperti : ruang kelas, ruang makan, dapur, barak siswa dan lapangan bola atau tempat olah raga yang dahulu mungkin tempat apel siswa SPN juga masih ASLI. Tak ketinggalan Tim Dokkes juga melihat ruangan perawatan untuk siswa yang sakit yang menurut Romo Maryono ruangan inipun dahulunya dipakai untuk kesehatan.

Dengan data bangunan fisik dan juga adanya bekas klinik siswa diduga bahwa kesehatan Polri sudah ada di SPN pertama ini. Semua itu merupakan data yang berarti dalam pengumpulan saksi-saksi sejarah tentang eksistensi kesehatan Polri pertama kali.

Pada tanggal 21 Maret 1995 tim diterima oleh Kadisdokkes Polda Jateng dan beliau memberikan buku sejarah Polri di Jateng yang mungkin bisa merupakan referensi yang berkaitan dengan penyusunan buku sejarah Disdokkes Polri.

Pada tanggal 22 Maret tim kembali ke Jakarta dengan membawa beberapa dokumentasi bangunan fisik dari bekas SPN pertama di Indonesia.



Tampak muka bekas SPN pertama Mertoyudan Magelang yang sekarang menjadi sekolah Seminari.